

PERAN MAHASISWA MAGANG DALAM MENDUKUNG PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DPRD KOTA PALU

**Fadil Adithya Ramadhan¹, Ni Putu Anastacya Queenara², Muhammad Yusri Ramadhan³,
Isman Bruaharja⁴, Asria Wahyuni Ahmad⁵, Bayu Febrianto⁶**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako ⁶Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palu

^{1,2,3,4,5}Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Kel.Tondo, Kec.Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah,
94148 ⁶Jl. Moh. Hatta No.14, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
94112

e-mail: ¹fadiladitiya663@gmail.com, ²anastacyaqu33nara@gmail.com,
³ricyusri1130@gmail.com, ⁴ismanbruaharja@gmail.com,
⁵Asriawahyuniyahmad0306@gmail.com, ⁶bayufeb86@gmail.com

Abstrak

DPRD memiliki fungsi representatif yang salah satunya diwujudkan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan penjangkaran aspirasi dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundangil) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Sekretariat DPRD melalui pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan, serta pengelolaan data aspirasi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk mendukung proses penjangkaran aspirasi masyarakat di DPRD Kota Palu melalui keterlibatan mahasiswa pada program magang mandiri MBKM. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Palu selama periode Februari sampai Mei 2026 menggunakan metode partisipatif dan kolaboratif dengan analisis deskriptif kualitatif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan dalam mendukung pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kundangil, meliputi dukungan administrasi, registrasi peserta, pendampingan masyarakat selama kegiatan berlangsung, serta pengelolaan aspirasi masyarakat secara digital melalui pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa membantu pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palu dalam mendukung fasilitasi dan pengelolaan aspirasi masyarakat secara lebih terstruktur dan sistematis.

Kata Kunci: Mahasiswa Magang, Penjangkaran Aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu, DPRD juga mempunyai peran representatif sebagai lembaga perwakilan yang menjembatani kepentingan masyarakat melalui penjangkaran aspirasi. Fungsi representasi ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi, namun merupakan unsur fundamental karena tanpa keterwakilan aspirasi, keberadaan lembaga perwakilan menjadi kurang bermakna. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi DPRD tetap berada dalam kerangka representasi rakyat yang diperkuat melalui ketentuan tata tertib di berbagai tingkatan pemerintahan daerah. [1]

Penjangkaran aspirasi masyarakat mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD karena masukan yang disampaikan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan yang

demokratis, keterlibatan masyarakat melalui penyampaian aspirasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. [2]. Oleh karena itu, optimalisasi penjangkaran aspirasi masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Dalam implementasinya, pelaksanaan fungsi representatif melalui penjangkaran aspirasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan tugas DPRD di tingkat daerah, termasuk DPRD Kota Palu. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi, DPRD Kota Palu melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti reses, kunjungan daerah pemilihan (kundangpil), dan rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung optimalisasi proses penjangkaran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim penulis di Kantor Sekretariat DPRD Kota Palu, pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat masih menghadapi kendala, terutama kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan administrasi reses dan pengelolaan data aspirasi masyarakat. Selain itu, kemampuan sebagian SDM dalam mengoperasikan sistem aplikasi digital penginputan aspirasi juga belum optimal, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan data aspirasi masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat di DPRD Kota Palu melalui keterlibatan mahasiswa dalam program magang MBKM (*Merdeka Belajar Kampus Merdeka*) untuk membantu administrasi reses dan pengelolaan aspirasi berbasis digital di Sekretariat DPRD Kota Palu

Adapun tujuan dari pengabdian ini dilakukan adalah untuk mendukung pelaksanaan administrasi reses&kundangpil serta membantu proses pengelolaan serta penginputan aspirasi masyarakat melalui sistem digital di Sekretariat DPRD Kota Palu. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mendukung optimalisasi fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat melalui keterlibatan mahasiswa magang MBKM dalam membantu pelaksanaan fungsi representatif DPRD.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode pengabdian partisipatif dan Kolaboratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.[3]

Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang menempatkan seluruh pihak yang terlibat sebagai subjek aktif dalam kegiatan melalui keterlibatan langsung pada proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan[4] Sedangkan pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang menekankan sebuah kerja sama, sinergi, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama melalui integrasi peran dan sumber daya yang dimiliki tiap-tiap pihak [5]

Metode partisipatif dipilih karena sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang MBKM, dimana mahasiswa terlibat secara langsung dalam mendukung aktivitas kerja di Sekretariat DPRD Kota Palu, khususnya pada kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan (kundangpil), serta pengelolaan dan penginputan data aspirasi masyarakat. Sedangkan metode kolaboratif digunakan sebab pelaksanaan kegiatan magang melibatkan kerja sama antara mahasiswa, pihak perguruan tinggi, dan Sekretariat DPRD Kota Palu sebagai mitra pengabdian dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan data aspirasi, serta pelaksanaan kegiatan reses dan kundangpil sehingga tercipta sinergi pelaksanaan kegiatan secara terpadu Data dan hasil pelaksanaan kegiatan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode tersebut dipakai agar dapat menggambarkan keterlibatan mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palu selama kegiatan magang MBKM.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang bertempat di kantor Sekretariat DPRD Kota Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, dimulai pada 3 Februari sampai dengan 22 Mei 2026

Adapun beberapa tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. *Tahap Persiapan dan Perencanaan* : Tahap ini dilakukan melalui koordinasi antara mahasiswa magang dengan pihak DPRD Kota Palu selaku mitra pengabdian terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada tahap ini dilakukan pengamatan awal terhadap alur kerja, kebutuhan administrasi, pengelolaan dokumen, serta mekanisme penginputan data aspirasi.
2. *Tahap Pelaksanaan* : Tahap pelaksanaan dilakukan melalui keterlibatan langsung mahasiswa magang dalam mendukung tugas dan aktivitas kerja staf Sekretariat DPRD Kota Palu. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan pelaksanaan kunjungan daerah pemilihan (kundangpil) dan reses anggota DPRD serta penginputan aspirasi masyarakat secara digital sebagai bagian dari proses penjangkaran aspirasi masyarakat. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa membantu proses administrasi, pendokumentasian kegiatan, pencatatan aspirasi yang disampaikan masyarakat, serta pengumpulan data hasil penjangkaran aspirasi.
3. *Tahap Evaluasi* : Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai peran mahasiswa magang dalam mendukung tugas staf Sekretariat DPRD Kota Palu. Evaluasi dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan kundangpil, reses, serta hasil pengelolaan dan penginputan data aspirasi masyarakat yang telah dilakukan sebelum dan setelah adanya kontribusi mahasiswa.

3. HASIL DAN PENGABDIAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah [6]. Keberadaan DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga politik daerah, tetapi juga sebagai sarana representasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan [7].

Secara Normatif, Dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lebih lanjut, Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjangkaran aspirasi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representatif DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat di daerah, sehingga aspirasi masyarakat menjadi landasan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD dibentuk pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsi representatif sesuai dengan cakupan wilayah pemerintahannya. DPRD Provinsi berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota menjalankan fungsi yang sama pada wilayah kabupaten atau kota.

Pada Tingkat Kota, Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundangpil). Kegiatan tersebut menjadi sarana komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, permasalahan, serta usulan pembangunan yang berkembang di daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses berperan sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi representatif DPRD dalam proses penyusunan kebijakan daerah [8]

Dalam menjalankan tugas tersebut, DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang berperan memberikan pelayanan administrasi serta fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD, termasuk administrasi reses, pelaksanaan kunjungan daerah pemilihan (*kundapil*), dokumentasi kegiatan, pengelolaan data, serta pengadministrasian hasil aspirasi masyarakat. Dukungan administrasi dan pengelolaan data tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi representatif DPRD, khususnya pada proses penghimpunan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan reses dan *kundapil*, kegiatan magang MBKM yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Palu turut melibatkan mahasiswa dalam mendukung proses penjangkauan aspirasi masyarakat. Keterlibatan mencakup pelaksanaan proses administratif kegiatan di lapangan, penginputan aspirasi masyarakat secara digital. Oleh karena itu, pembahasan hasil kegiatan pengabdian difokuskan pada peran mahasiswa magang dalam membantu Sekretariat DPRD Kota Palu melakukan fasilitasi penjangkauan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD yang meliputi:

a. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Reses dan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) anggota DPRD Kota Palu

Kegiatan reses merupakan salah satu sarana yang digunakan DPRD dalam melaksanakan fungsi representatif melalui penjangkauan dan penghimpunan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kegiatan reses dilaksanakan sebagai media komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, menerima usulan, serta memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi DPRD[9] Selain itu, kegiatan reses juga dipandang sebagai bentuk pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat melalui penghimpunan aspirasi secara langsung[10]

Selain kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan (*kundapil*) juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi representatif DPRD. *Kundapil* sendiri dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke wilayah pemilihan guna memperoleh informasi mengenai kondisi riil masyarakat, perkembangan wilayah, serta berbagai kebutuhan yang berkembang di daerah pemilihan [11] Pelaksanaan *kundapil* menjadi sarana bagi DPRD untuk memperoleh informasi lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan reses dan *kundapil* mempunyai berfungsi sebagai sarana penghimpunan aspirasi masyarakat akan tetapi kegiatan tersebut sangat memerlukan dukungan administratif dan teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan hasil aspirasi masyarakat yang diperoleh di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (*kundapil*) di DPRD Kota Palu masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan dukungan administratif dan teknis secara optimal. Kegiatan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyusunan administrasi, registrasi peserta, dokumentasi kegiatan, pencatatan dan pengelolaan aspirasi masyarakat, hingga pendampingan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan banyaknya anggota DPRD yang melaksanakan reses dan *kundapil* pada setiap periode. Akibatnya, beban kerja Sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan layanan fasilitasi juga semakin besar. Kondisi ini menuntut adanya dukungan sumber daya tambahan yang memadai, baik dari sisi tenaga maupun pengelolaan administrasi. Dengan adanya dukungan tersebut, proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan terkoordinasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat dihimpun, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti dengan lebih baik serta mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat di berbagai wilayah daerah pemilihan.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Reses



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kundapil)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang MBKM, mahasiswa turut dilibatkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan sumber daya tambahan pada pelaksanaan kegiatan reses dan kundapil di DPRD Kota Palu. Selama pelaksanaan magang berlangsung, mahasiswa hadir dan terlibat secara langsung dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) anggota DPRD Kota Palu. Keterlibatan tersebut dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Pada tahap persiapan, mahasiswa membantu pelaksanaan administrasi kegiatan dengan mendukung penyusunan daftar hadir peserta, penyiapan dokumen administrasi, serta membantu staf Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan reses dan kundapil. Selain itu, mahasiswa juga membantu proses registrasi awal peserta dan memastikan

kelengkapan administrasi pendukung agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan kesiapan administrasi sebelum kegiatan dimulai.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan kegiatan, mahasiswa terlibat secara langsung dalam pendampingan masyarakat selama kegiatan reses dan kundapil berlangsung. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi membantu kebutuhan teknis peserta kegiatan, mengarahkan masyarakat selama proses pelaksanaan kegiatan, serta mendukung kelancaran penyampaian aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD. Mahasiswa juga membantu staf Sekretariat DPRD dalam proses pendokumentasian kegiatan serta memastikan kelancaran pelaksanaan administrasi selama kegiatan berlangsung sehingga proses penghimpunan aspirasi masyarakat dapat berjalan secara tertib dan terarah.

Sementara itu, pada tahap pasca kegiatan, mahasiswa turut membantu proses pengelolaan administrasi hasil kegiatan melalui pengecekan kelengkapan daftar hadir, penyusunan dokumentasi kegiatan, serta pencatatan dan pengelolaan hasil aspirasi masyarakat yang diperoleh selama pelaksanaan reses dan kundapil. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses tindak lanjut hasil penjangkaran aspirasi sebelum dilakukan pengelolaan dan penginputan data pada tahapan administrasi berikutnya.

Keterlibatan mahasiswa tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palu, khususnya dalam mendukung fasilitasi kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil). Hal ini sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan Sekretariat DPRD, serta tingginya intensitas pelaksanaan kegiatan reses dan kundapil oleh banyaknya anggota DPRD pada setiap periode kegiatan. Kondisi tersebut sebelumnya menyebabkan beban kerja administratif menjadi cukup tinggi, terutama dalam proses pendampingan kegiatan, pencatatan aspirasi, serta pengelolaan administrasi pendukung.

Dengan adanya keterlibatan mahasiswa magang, sebagian tugas administratif dan teknis dapat terbantu, sehingga pelaksanaan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih tertata, efektif, dan terorganisir. Hal ini sejalan dengan penelitian Harisda dkk. yang menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa magang pada instansi pemerintah dapat membantu pelaksanaan pekerjaan administratif serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas instansi [12]. Dengan demikian, dukungan yang diberikan mahasiswa tidak hanya mengurangi beban proses administrasi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelancaran proses penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representatif DPRD.

b. Penginputan data aspirasi masyarakat kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

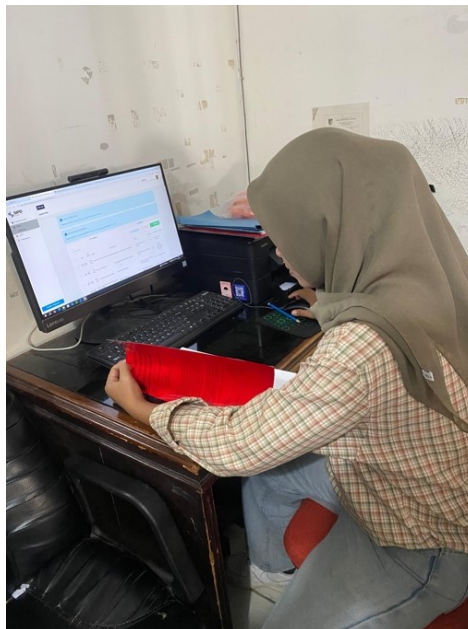
Penjangkaran aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada proses penghimpunan aspirasi masyarakat di lapangan seperti reses dan kundapil, tetapi juga dilanjutkan pada tahapan pengelolaan dan pengadministrasian hasil aspirasi. Aspirasi yang telah dihimpun selanjutnya dilakukan proses verifikasi, pengelompokan, serta pengelolaan data agar informasi yang diperoleh dapat terdokumentasi secara sistematis dan menjadi bahan pendukung dalam pelaksanaan fungsi representatif DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan data yang mampu mendukung proses administrasi aspirasi masyarakat secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Seiring dengan penerapan sistem administrasi berbasis digital pada pemerintahan daerah, proses pengelolaan aspirasi masyarakat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sendiri merupakan sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan data pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan informasi daerah secara

terintegrasi berbasis digital. Implementasi SIPD dilakukan untuk mendukung proses pengelolaan data yang lebih terstandar, memudahkan proses pemantauan, serta meningkatkan efektivitas penyusunan dokumen perencanaan daerah [13] Dalam konteks pelaksanaan fungsi representatif DPRD, penginputan aspirasi masyarakat melalui sistem digital menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan hasil penjarangan aspirasi masyarakat sebagai bahan pendukung penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD [14]

Dalam implementasinya, penggunaan SIPD dalam pengelolaan aspirasi masyarakat membutuhkan proses administrasi yang cukup kompleks dan ketelitian tinggi. Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian, pengelolaan dan penginputan aspirasi masyarakat ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Kota Palu menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, khususnya keterbatasan tenaga pendukung yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan administrasi berbasis digital. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi, penyortiran, pengelompokan, serta penginputan data aspirasi masyarakat memerlukan waktu yang relatif panjang, terlebih dengan banyaknya usulan masyarakat yang dihimpun dari kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (*kundapil*). Selain itu, proses pengelolaan data pada aplikasi SIPD membutuhkan ketelitian dan pemahaman terhadap mekanisme sistem sehingga diperlukan dukungan sumber daya tambahan untuk membantu pelaksanaan pengelolaan data aspirasi masyarakat secara digital.

Dalam kegiatan pengabdian ini, mahasiswa berperan penting dalam membantu mengatasi keterbatasan tersebut melalui keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan administrasi dan penginputan data aspirasi masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi bagian dari dukungan sumber daya tambahan yang membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan, khususnya pada tahapan-tahapan pengolahan data sebelum diinput ke dalam sistem SIPD. Dalam hal ini, mahasiswa membantu pelaksanaan penginputan aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari verifikasi, penyortiran, hingga pengelompokan data, sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.



Gambar 3. Kegiatan Penginputan Aspirasi Masyarakat Secara Digital

Dalam pelaksanaannya, hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (*kundapil*) selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses pengelolaan administrasi dan penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses pengelolaan tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa seluruh data aspirasi masyarakat dapat terdokumentasi secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah. Adapun tahapan pengelolaan tersebut meliputi:

- a. *Verifikasi kelengkapan data* : Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap seluruh data aspirasi masyarakat yang diperoleh dari kegiatan reses dan kundapil. Verifikasi mencakup identitas pengusul, jenis usulan, lokasi, serta uraian kebutuhan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang akan diproses telah lengkap, valid, dan sesuai dengan hasil pencatatan di lapangan.
- b. *Penyortiran usulan berdasarkan bidang* : Setelah data dinyatakan lengkap, dilakukan proses penyortiran berdasarkan bidang permasalahan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis serta penyesuaian dengan program dan prioritas pembangunan daerah.
- c. *Pengelompokan dan konsolidasi data* : Pada tahap ini, usulan yang telah disortir kembali dikelompokkan berdasarkan kesamaan wilayah, jenis kebutuhan, serta tingkat prioritas. Proses konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari duplikasi data serta memastikan keterpaduan informasi sebelum masuk ke tahap penginputan sistem.
- d. *Penyesuaian dokumen pendukung* : Tahapan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung seperti proposal, dokumentasi lapangan, serta catatan hasil aspirasi. Penyesuaian dilakukan agar setiap usulan memiliki dasar administrasi yang jelas sebelum diinput ke dalam sistem SIPD.
- e. *Penginputan data ke dalam SIPD* : Data yang telah melalui tahapan sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Penginputan mencakup judul usulan, uraian kegiatan, lokasi, dan bidang urusan pemerintahan. Proses ini dilakukan secara terstruktur agar data dapat tersimpan dengan baik dalam sistem informasi pemerintah daerah.
- f. *Monitoring dan pemantauan data* : Tahap akhir adalah pemantauan terhadap status usulan yang telah diinput ke dalam sistem. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data telah tercatat dengan benar dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palu, khususnya pada proses pengelolaan data aspirasi masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini menjadi relevan dengan kondisi sebelumnya yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi berbasis digital, sehingga proses verifikasi, penyortiran, pengelompokan, hingga penginputan data aspirasi memerlukan waktu dan tenaga yang relatif besar, terutama dalam menghadapi tingginya volume usulan dari kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil). Dalam konteks tersebut, keterlibatan mahasiswa berfungsi sebagai dukungan tambahan yang membantu memperkuat kapasitas kerja pada tahapan pengelolaan data yang bersifat teknis dan berulang, sehingga beban kerja staf dapat lebih terdistribusi.

Dukungan yang diberikan membantu mengurangi beban kerja staf pada tahapan verifikasi, penyortiran, pengelompokan, serta penginputan data aspirasi yang membutuhkan ketelitian dan waktu pengolahan yang relatif panjang. Selain membantu aspek sumber daya manusia, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan administrasi berbasis digital juga turut mendukung optimalisasi pemanfaatan sistem SIPD dalam pengelolaan aspirasi masyarakat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu. Hal ini sejalan dengan penelitian Padila dkk. yang menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa magang pada instansi pemerintah berkontribusi dalam mendukung pengelolaan data berbasis digital melalui kegiatan verifikasi, pembaruan, dan pengelolaan data pada sistem informasi yang digunakan instansi [15]. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa tidak hanya membantu pelaksanaan administrasi dan pengelolaan data aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pelaksanaan

digitalisasi administrasi sehingga pengelolaan aspirasi masyarakat dapat berjalan secara lebih sistematis dan terstruktur.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang MBKM di Sekretariat DPRD Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa berperan dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi penjangkauan aspirasi masyarakat yang sebelumnya menghadapi kendala berupa peningkatan beban kerja pada kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil), serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan aspirasi berbasis digital. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan pada kegiatan administrasi, registrasi peserta, pendampingan pelaksanaan reses dan kundapil, serta pengelolaan data aspirasi masyarakat yang meliputi proses penyortiran, pengelompokan, dan penataan usulan sebelum dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palu, khususnya dalam proses pengelolaan dan fasilitasi aspirasi masyarakat yang bersifat administratif dan teknis, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan terstruktur. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan gambaran bahwa dukungan tambahan sumber daya manusia pada pengelolaan berbasis digital menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses administrasi dan pengolahan data aspirasi masyarakat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu.

5. SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu diharapkan dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui optimalisasi keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kelembagaan, khususnya pada pelaksanaan reses, kunjungan daerah pemilihan (kundapil), pengelolaan aspirasi masyarakat, serta kegiatan administrasi pendukung lainnya. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis dalam memahami sistem kerja lembaga legislatif, pelaksanaan fungsi representatif DPRD, serta mekanisme pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret melalui perluasan ruang partisipasi mahasiswa pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, hingga pengolahan dan penginputan data hasil reses serta kunjungan daerah pemilihan. Keterlibatan yang lebih menyeluruh diharapkan mampu meningkatkan pengalaman praktis mahasiswa sekaligus mengembangkan kompetensi dalam bidang administrasi, komunikasi, pengelolaan data, dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penguatan sistem pendampingan dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan juga perlu ditingkatkan melalui pemberian arahan yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala agar proses pembelajaran dan pelaksanaan magang dapat berjalan secara optimal. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami alur kerja kelembagaan secara lebih mendalam serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu inovasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengelolaan dan penginputan aspirasi masyarakat, pengelompokan data hasil reses dan kundapil, penyusunan dokumentasi, serta peringkasan dan pengolahan laporan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi tersebut

diharapkan mampu meningkatkan akurasi, mempercepat proses administrasi, serta mendukung digitalisasi pengelolaan data agar lebih sistematis dan terintegrasi.

Dengan adanya peningkatan keterlibatan mahasiswa, penguatan sistem pendampingan, serta pemanfaatan teknologi berbasis AI, pelaksanaan program magang MBKM di Sekretariat DPRD Kota Palu diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi instansi maupun mahasiswa, serta mampu mendukung terciptanya pelaksanaan administrasi dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Anggota Dewan serta Sekretariat DPRD Kota Palu atas berbagai bentuk dukungan, bantuan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk magang. Kesempatan tersebut memberikan pengalaman, pengetahuan, serta pembelajaran yang sangat berharga selama proses pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh rangkaian program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf Subbagian Aspirasi beserta seluruh staf DPRD Kota Palu lainnya yang telah berperan aktif dan memberikan bantuan selama proses pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan (kundupil), serta proses penginputan dan pengelolaan data aspirasi masyarakat. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan teknis, tetapi juga pendampingan, arahan, serta kerja sama yang baik selama kegiatan berlangsung.

Melalui bimbingan, pendampingan, serta dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak terkait, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis, baik dalam pengembangan kompetensi akademik maupun pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan DPRD Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Muhammad Hilmi, A. Hafizh M. Rahmatullah, and D. Alghifari, "Menakar Fungsi Representasi DPRD Provinsi Bali: Studi Kasus Penolakan Desa Adat Intaran terhadap Proyek Terminal Liquefied Natural Gas (LNG)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, vol. 11, no. 3, pp. 261–266, Jul. 2022.
- [2]. N. S. Rofiah and G. W. Pradana, "Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Secara Efektif," *DINAMIKA PUBLIK*, vol. 3, no. 3, pp. 1-15, Jul. 2025.
- [3]. A. Zunaidi, *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Bekasi: Yayasan Putra Adi Dharma, 2024.H.
- [4]. H. Satriawan, M. N. Ilyas, M. J. W. R., and A. Shafyra, "Kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Pendekatan Partisipatif di Destinasi Wisata Pantai Impos, Tanjung, Lombok Utara," *JUAN*, vol. 3, no. 1, pp. 45-52, Jan. 2026
- [5]. M. Fachrin and H. Ansyar, "Menggagas Model Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Berbasis Pentahelix untuk Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan," *SJPKM*, vol. 4, no. 1, pp. 708-712, Jan. 2025.
- [6]. E. Tampubolon, R. Sitanggang, and H. Siallagan, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Visi Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 21-30, Jun. 2020.

-
- [7]. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024 di Kabupaten Barru,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, vol. 5, no. 6, pp. 1215-1228, 2025.
- [8]. N. K. Pratama and D. F. Adni, “Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, vol. 8, no. 4, pp. 1866-1875, 2024.
- [9]. R. Azzahri, S. Andri, and Adianto, “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat,” *Jurnal Niara*, vol. 14, no. 1, 2021.
- [10]. D. Kurniasih and Y. Rusfiana, “Fungsi Reses Anggota DPRD dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung,” *Jurnal Academia Praja*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [11]. T. D. S. A., U. D. Hananto, and U. S. Hardjanto, “Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4, 2019.
- [12]. Harisda *et al.*, “Kontribusi Mahasiswa Magang sebagai Bagian dari Penguatan Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Parepare,” *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, 2025.
- [13]. A. J. Syarifuddin, A. Rahim, and S. Astuty, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan),” *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, vol. 2, no. 11, 2024.
- [14]. M. Arifin *et al.*, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.
- [15]. A. Padila, F. A. S. Lubis, P. M. Harahap, and R. D. Nasution, “Peran Mahasiswa Magang dalam Mendukung Pengelolaan Data Pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII,” *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 14, no. 2, 2025.